

**DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP
IMPLEMENTASI OTONOMI ASLI DESA**

Di Desa Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

ROBY YUSUF BEKULIU

41107014



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2013**

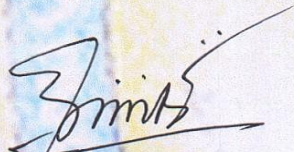
LEMBAR PENGESAHAN

KUPANG, NOVEMBER 2013

**DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI OTONOMI
ASLI DESA
DI DESA FATUONI KECAMATAN AMANATUN UTARA KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN**

Skripsi ini telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

PEMBIMBING I



Drs. Frans Bapa Tokan, MA

PEMBIMBING II



Drs. Rodriques Servatius, M.Si

MENGETAHUI

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**



Drs. Frans Nyong, M.Si



MOTTO

**JANGANLAH HENDAKNYA KAMU KUATIR TENTANG
APAPUN JUGA, TETAPI NYATAKANLAH DALAM SEGALA
HAL KEINGINANMU KEPADA ALLAH DALAM DOA DAN
PERMOHONAN DENGAN UCAPAN SYUKUR.**

(FILIPPI 4 : 6)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- 1. Buat Ayah Marthen Bekullu, SH dan Bunda Antoneta Bekuliu-Hendrik, S.Pd tercinta atas perhatian, dan kasih sayang, terutama karena telah membiayai perkuliahan**
- 2. Buat Anak Tercinta Junior Blassius Ola Wotan atas doa, waktu dan perhatian sejak awal Penulis kuliah sampai penulisan Skripsi ini.**
- 3. Kakak dan Adik Kandung Pdt. Denno N. Bekuliu, S.Th, Desty A. Bekuliu, S.Pd, Frengky M. Bekuliu,**
- 4. Almamater tercinta FISIP UNWIRA Kupang.**



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jl. Jend. Achmad Yani 50 - 52, Telp. (0380) 833395, Fax. 831194

Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada Hari ini, *Jumat Tanggal 25 Oktober 2013 Jam 10.00* Telah diadakan
Ujian Sarjana Program Skripsi, bagi mahasiswa :

Nama : Roby Yusuf Bekuliu
No. Reg. : 411 07 014
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi :

**"DAMPAK UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP
IMPLEMENTASI OTONOMI ASLI DESA DI DESA
FATUONI, KECAMATAN AMANATUN UTARA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN".**

Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri dari :

- 1 Ketua : Drs. Frans Bapa Tokan, MA
- 2 Sekretaris : Drs. Rodriques Servatius, M.Si
- 3 Penguji Materi I : Veronika I.A. Boro, S.IP, M.Si
- 4 Penguji Materi II : Leonardus Lelo, S.IP
- 5 Penguji Materi III : Drs. Frans Bapa Tokan, MA
- 6 Pembimbing I : Drs. Frans Bapa Tokan, MA
- 7 Pembimbing II : Drs. Rodriques Servatius, M.Si

Hasil Ujian diperoleh sebagai berikut :

Nilai yang diperoleh dari Penguji I = 80
Penguji II = 80
Penguji III = 84

Lulus dengan Nilai = 84 (Delapan Puluh satu)

Belum Lulus dan diberikan kesempatan untuk ujian ulang pada :

HARI : _____, TANGGAL : _____, JAM : _____
Hasil Ujian Ulang = _____



Kupang, 25 Oktober 2013
Ketua Tim Penguji,

DRS. FRANS BAPA TOKAN, MA

LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roby Yusuf Bekuliu

Nomor Registrasi : 41107014

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis (Skripsi) dengan judul :

“Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Otonomi Asli Desa, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan”

Adalah benar-benar karya sendiri yang dibimbing oleh Drs. Frans Bapa Tokan selaku Pembimbing I dan Drs. Rodriques Servatius, M.Si selaku Pembimbing II. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan, maka saya bersedia dituntut secara hukum.

Kupang, November 2013

Roby Yusuf Bekuliu

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya yang begitu besar, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Pemerintahan pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Dekan FISIP UNWIRA KUPANG.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNWIRA KUPANG.
4. Ibu Veronika I. A. Boro, S.IP, M.Si, sebagai Penasihat Akademik.
5. Bapak Drs. Frans Bapa Tokan, MA, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Rodriques Servatius, M.Si, selaku Pembimbing II, atas waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Loenardus Lelo, S.IP dan Ibu Veronika I. A Boro, S.IP, M.Si, selaku Pembahas dan Penguji I dan II yang telah memberikan masukan demi penyempurnaan Skripsi ini.

7. Dosen dan Staf Tata Usaha FISIP UNWIRA yang telah banyak membekali ilmu pengetahuan dan memberikan pelayanan kepada Penulis selama kuliah sampai pada penulisan Skripsi ini.
8. Kepala Badan Pelayanan Satu Atap Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Kebangpolinmas Kabupaten Timor Tengah Selatan, Camat Amanatun Utara dan Kepala Desa Fatuoni.
9. Responden yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai (Bapak Andreas Nako, Bapak Rofinus Tefa, Bapak Nahor Taniu, Bapak Barnabas Neonbanu dan Bapak Drs. Maxi Oematan, M.Si).
10. Kakak dan Adik (Kakak Selfy Kapuru, Amd.Kep, Kakak Pdt. Leny Banunaek-Hendrik, M.Th, Ivan Taneo, S.Pd, Putri Nengsih, SE, Evan Santiago, Sonia Esterina Ndoen, Mervin, Tomy, Marny, Febby, John, Axel, Gerry, Putry).
11. Keluarga Besar Bekuliu/Beukliu, Taek, Benu, Sayuna dan Ello (Bapak Yeremias Bekuliu, S.Pd, Bapak Alexander Bekuliu, Bapak Maxi Taek, Bapak Saul Benu, Bapak Simon Bekuliu, Bapak Wellem Sayuna, Bapak Pdt. Origenes Ello, S.Th dan Bapak Dominggus Beukliu).
12. Rekan-rekan seperjuangan : Ahong, Ardy, Jakson, John, Ivan dan semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah membagi pengetahuan selama masa perkuliahan.

13. Rekan-rekan Pusat Pengembangan Anak IO-647 (Koordinator dan staf) yang telah memberikan dukungan doa dan materi (Ibu Yanti Ga Loni, S.Kom, M.Pdk).

Akhirnya Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kualitas penulisan ini dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Kupang, November 2013

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Otonomi Asli Desa**, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Secara Konseptual otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Otonomi Desa mengandung tiga makna: (a) Hak Desa untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumber daya ekonomi-politik; (b) Kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) Tanggungjawab Desa untuk mengurus kepentingan publik (rakyat) desa melalui pelayanan publik. Implementasi otonomi desa dipengaruhi oleh regulasi.

Dalam rangka menggambarkan Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari para responden melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, Penulis menentukan responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang dilakukan secara Purposive. Untuk menganalisis Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa, di Desa Fatuoni, Kecamatan Amantun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan maka digunakan variabel dengan indikatornya; Ada tidaknya pelaksanaan kewenangan berbasis asal usul, Adanya tugas-tugas pembantuan yang sesuai dengan kemampuan desa, Ada tidaknya legitimasi kepemimpinan kepala desa dan BPD, Meningkatnya posisi desa sebagai daerah yang otonom dan bukan sebagai daerah administrasi semata, Hilang tidaknya keaslian desa dalam konteks otonomi asli sesuai asal usul desa yakni kekuasaan desa sebagai Kuan Tuaf dan Kepala Desa sebagai Ama Desa atau Temukung, Nakaf dan sebutan lainnya sesuai dengan desa setempat, Hilang tidaknyanya swadaya dan gotong royong masyarakat, Lumpuhnya inisiatif dan kreativitas pembangunan masyarakat desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Desa Fatuoni merupakan salah satu wilayah otonom yang berada dalam wilayah kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Desa ini dibentuk dari 4 Temukung Besar : *Tupa*, *KuanUsapi*, *Liuleni* dan *Tobin* yang dikuasai oleh sepuluh Kua Tuaf antara lain : Linome, Nauf, Basleni, Nako, Ma'feo, Lopo, Hala, Boti, Fai dan Bell. Kua Tuaf ini merupakan komunitas asli yang terstruktur dan

terpimpin. Seiring dengan berjalannya waktu desa ini kemudian dibentuk dengan Keputusan Gubernur KDH. Swatantra Tk. I Nusa Tenggara Timur Nomor : Und.2/1/27 tanggal 4 November 1964 tentang Pembentukan Desa Gaya Baru di seluruh Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati KDH Tk. II Timor Tengah Selatan Nomor : DD.12/II/I tanggal 7 Mei 1969 mengenai Pembentukan Desa-Desa Gaya Baru di Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan desa berbasis asal usul dilaksanakan oleh desa. Belum adanya pelimpahan tugas pembantuan kepada desa oleh pemerintah. Adanya legitimasi kepemimpinan Kepala Desa dan BPD berdasarkan demokrasi desa dan kewenangan Kepala Desa dan Fungsi Kepala Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Memberikan landasan yang kuat menuju terbentuknya komunitas yang mandiri dan otonom. Kekuasaan desa sebagai *Kua Tuaf* dan Kepala Desa sebagai *Nakaf* tetap dijunjung tinggi. Gotong royong dan swadaya masyarakat merupakan sifat dan pola hidup masyarakat yang masih terjaga. Kreativitas dan Inisiatif pembangunan desa dimiliki oleh desa berupa kelompok usaha bersama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dampak yang diharapkan dari Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa berjalan dengan baik. Hal ini terwujud dari adanya pelaksanaan kewenangan berbasis asal usul, adanya legitimasi kepala desa dan BPD, memposisikan desa sebagai daerah yang otonom, kekuasaan desa sebagai *Kua Tuaf* dan kepala desa sebagai *Nakaf*. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan dari Dampak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi otonomi asli Desa dapat disimpulkan bahwa, masih adanya semangat gotong royong, serta masih adanya kreativitas dan inisiatif pembangunan.

Untuk itu, penulis menyarankan memiliki kesiapan untuk menjalankan pelimpahan kewenangan, menjaga keharmonisan hubungan kemitraan antara Kepala Desa dan BPD, meningkatkan posisi desa dengan melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan pemerintah desa, peningkatan semangat gotong royong dan inisiatif dan kreativitas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Otonomi Desa.....	11
C. Implementasi Otonomi Desa.....	16
D. Dampak Regulasi Terhadap Otonomi Desa.....	17

BAB III METODE PENELITIAN..... 25

A. Penentuan Metode Penelitian.....	25
B. Teknik Pemilihan Informasi.....	25
C. Operasional Variabel.....	27
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	29

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Dan Dasar Hukum Terbentuknya Desa.....	30
B. Gambaran Umum Desa Fatuoni.....	33
C. Letak, Batas Dan Luas Wilayah Desa Fatuoni.....	34
D. Keadaan Penduduk Desa Fatuoni.....	34
E. Kondisi Ekonomi.....	37
1. Potensi Unggul Desa.....	37
2. Keuangan Desa.....	44

F. Bagan Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Adat...	45
1. Bagan Organisasi.....	45
2. Kelembagaan Adat.....	46
3. Susunan Perangkat dan Kelengkapan Desa.....	47

BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Dampak Yang Diharapkan.....	52
a. Dampak terhadap kewenangan.....	52
1. Ada tidaknya pelaksanaan kewenangan berbasis..... asal usul	52
2. Adanya tugas-tugas pembantuan yang sesuai dengan.... kemampuan desa	62
b. Dampak terhadap bentuk dan susunan penyelenggaraan.... pemerintahan desa.	68
- Ada tidaknya legitimasi kepala desa dan BPD.....	68
c. Dampak terhadap kedudukan desa.....	74
- Meningkatnya posisi desa sebagai daerah yang..... Otonom dan bukan sebagai daerah administrasi	74
B. Dampak Yang Tidak Diharapkan.....	79
a. Hilang tidaknya keaslian desa dalam konteks otonomi..... asli sesuai asal usul desa yakni kekuasaan desa sebagai Kuan Tuaf dan Kepala Desa sebagai Ama Desa atau Temukung, Nakaf dan sebutan lainnya sesuai dengan desa setempat.	79
b. Hilangnya swadaya dan gotong royong masyarakat.....	83

c. Hilangnya inisiatif dan kreativitas pembangunan..... masyarakat desa	89
--	----

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA.....	102
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	103
-------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
1.	Dampak Yang Diharapkan dan Dampak Yang Tidak diharapkan Atas Perubahan Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Otonomi Asli Desa.	23
2.	Riwayat Pengaturan Hukum	24
3.	Jumlah penduduk Per RT/RW Tahun 2009-2010 Desa Fatuoni.	35
4.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan	36
5.	Potensi Tanaman Pangan di Desa Fatuoni	37
6.	Perkembangan Populasi Ternak di Desa Fatuoni	39
7.	Populasi Ternak per Kepala Keluarga di Desa Fatuoni Tahun 2009-2010	39
8.	Produktivitas Perkebunan di Desa Fatuoni	40
9.	Potensi Kehutanan di Desa Fatuoni	42
10.	Realisasi Total Pendapatan Desa Fatuoni	44
11.	Realisasi Pendapatan Desa Menurut Sumber Pendapatan	44
12.	Status Sosial Orang Timor Dawan	80

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAMAN
1.	Kebun Desa yang menjadi sumber produktivitas perkebunan, Kuan Usapi-Fatuoni	41
2.	Bagan Organisasi Pemerintahan Desa Desa Fatuoni, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan	45
3.	Bagan Kelembagaan Adat di Desa Fatuoni	46
4.	Hutan desa tempat sembayang pada <i>Uis Neno</i>	53
5.	<i>Ume Kbubu</i> (rumah Bulat)	54
6.	<i>Suni</i> (kelewang)-Alat/perlengkapan berkebun orang Timor, Fatuoni khususnya.	55
7.	Tempat Sembayang kepada <i>Uis Pah</i> dan tempat pertemuan.	57
8.	Lumbung desa dan tempat pertemuan adat.	62

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1. Pedoman Wawancara	106
2. Curriculum Vitae	108
3. Dokumentasi	109
4. Surat Ijin Melakukan Penelitian Dari Dekan DEKAN FISIP UNWIRA KUPANG	113
5. Surat Ijin Melakukan Penelitian Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	114
6. Surat Ijin Melakukan Penelitian Dari Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Timor Tengah Selatan	115
7. Surat Ijin Melakukan Penelitian Dari Kecamatan Amanatun Utara, Kab. TTS	116
8. Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kepala Desa Fatuoni, Kec. Amanatun Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan	117
9. Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kecamatan Amanatun Utara, Kab. TTS	118
10. Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Timor Tengah Selatan	119
11. Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	120